

- 02** GOVERNMENTTODAY
Presiden Prabowo dan Xi Jinping Bahas Proyek Giant Sea Wall
- 04** NUSANTARA
Kala Menteri Agama Singgung Guru dan Berakhir Minta Maaf
- 10** LISTSTYLE
Polusi Udara Berdampak Buruk pada Kesehatan Kulit

○○○
Diberitahukan kepada pembaca setia, Jumat (5/9/2025) Harian Lentera tidak terbit, Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H. Terbit kembali pada Senin (8/9/2025). Update berita bisa terus diikuti melalui www.lentera.co dan www.lenteratoday.com.

POIN 17+8

TUNTUTAN RAKYAT

Untuk Presiden Prabowo

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.



MEMAKNAI PINK, HIJAU, DAN 17+8 TUNTUTAN

Sejak beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan poster hitam dengan aksen merah muda (pink) dan hijau berisi 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah. Dua warna ini seolah menjadi seragam baru perjuangan, terlihat di berbagai unggahan warganet maupun poster yang dibagikan figur publik seperti komedian, penyanyi, hingga aktor. Banyak tokoh dan masyarakat mengganti foto profil dengan kombinasi pink-hijau sebagai simbol solidaritas dalam menyuarakan aspirasi. Istilah "17+8 Tuntutan Rakyat" lahir sebagai respons atas desakan publik yang bergema di dunia maya. Rangkuman aspirasi lintas kelompok dari mahasiswa hingga NGO, pertama kali diunggah Andhyta F. Utami dari Think Policy, lengkap dengan format hitung mundur di situs tuntutanrakyat-2e476.web.app. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai, Polri, TNI, serta sejumlah kementerian di bidang ekonomi.

Untuk TNI

12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Selain tuntutan jangka pendek, terdapat pula 8 agenda reformasisistemik, di antaranya:

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

PRESIDEN PRABOWO DAN XI JINPING BAHAS PROYEK GIANT SEA WALL

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping melakukan pertemuan bilateral di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa.

Di Beijing, Prabowo melakukan lawatannya selama kurang dari 8 jam, mulai dari menghadiri parade militer angkatan bersenjata China kemudian bertemu secara khusus dengan Presiden China Xi Jinping. Setelah itu juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam acara parade militer di Tian'anmen, Beijing, Presiden Prabowo mendapatkan kehormatan duduk di kursi utama barisan depan bersama tuan rumah, Presiden Xi. Di barisan terdepan itu, ada pula Presiden Putin dan Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un.

Kemudian terkait pertemuan bilateral dengan Presiden Xi dan Presiden Putin, Seskab Teddy menjelaskan Presiden Prabowo menindaklanjuti berbagai pembicaraan mengenai kerja sama dan investasi ekonomi antara Indonesia dengan China dan Rusia. Dalam dua pertemuan bilateral itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskab Teddy, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.

Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas undangan Presiden Xi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin serta perayaan di Beijing. Kepala Negara menyampaikan permohonan maaf berhalangan hadir pada KTT SCO.

Presiden pun menyampaikan berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada dirinya dan delegasi Indonesia sejak tiba di Beijing. Presiden Prabowo turut menyinggung pertemuan terakhirnya dengan Presiden Xi pada kunjungan kenegaraan ke Beijing bulan November 2024. Kepala Negara menilai bahwa pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam hubungan strategis kedua negara.

Seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan Tiongkok. Komitmen ini diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

Dia menandakan bahwa pertemuan bilateral ini juga mencerminkan kesamaan pandangan Indonesia dengan China dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerja sama internasional. Pertemuan bilateral ini menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di RRT, sekaligus penguat fondasi hubungan persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade.

Selepas itu, Presiden Prabowo, didampingi oleh Seskab Teddy, meninggalkan Beijing menuju Jakarta sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Kemudian, pesawat kepresidenan tiba di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 21.00 WIB.

Presiden Xi Jinping sedianya mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus - 1 September 2025 di Tianjin, China, yang kemudian dilanjutkan dengan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing pada 3 September. Namun, Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT SCO itu, dan kehadiran Presiden pun diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan alasan Presiden yang pada akhirnya memutuskan melawat



Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping.

ke China, antara lain, situasi keamanan di dalam negeri yang telah kembali normal, begitu pun dengan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang pekan lalu ricuh telah kembali berjalan seperti sedia kala.

"Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala," kata Prasetyo Hadi.

Kemudian, Pemerintah China, dalam beberapa hari belakangan, sebagaimana disampaikan Pras, juga memohon dengan sangat kehadiran Presiden Prabowo, setidaknya satu hari dalam acara parade militer di Beijing. "Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk Beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam, Beliau sudah akan kembali ke tanah air," ujar Pras.

Prasetyo menjelaskan bahwa undangan Presiden Xi sejatinya telah dijadwalkan sejak 31 Agustus 2025 yang lalu. Namun, Presiden Prabowo sempat menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Menteri Pras mengungkapkan adanya permintaan khusus dari pemerintah Tiongkok agar Presiden Prabowo dapat hadir dalam acara peringatan 80 tahun sekaligus parade militer yang digelar di Beijing. "Dalam beberapa hari belakangan ini, ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri, paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok," ujar Menteri Pras.

Menteri Pras menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan secara matang dinamika yang tengah berlangsung di

PRABOWO HADIRI PARADE MILITER & PERTEMUAN BILATERAL DI BEIJING

Beijing, 3 September 2025

Agenda Utama:

- Hadiri parade militer peringatan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China & Perang Dunia Anti-Fasis di Tian'anmen.
- Pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping (China) → bahas proyek Giant Sea Wall & kerja sama ekonomi.
- Pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin (Rusia).

Kehadiran & Pendamping:

- Didampingi Menlu Sugiono, Seskab Teddy, Dubes RI Djauhari Oratmangun.
- Duduk di barisan utama bersama Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un.

Hasil & Komitmen:

- Indonesia-China sepakat memperkuat kemitraan strategis (75 tahun hubungan diplomatik).
- Jaga stabilitas kawasan & perluas kerja sama internasional.
- Apresiasi undangan KTT SCO, namun Prabowo batal hadir (diwakili Menlu).

Alasan Kunjungan Singkat:

- Situasi dalam negeri dinilai kembali normal.
- Adanya permintaan khusus dari Pemerintah China.
- Total lawatan: < 8 jam (berangkat pagi, pulang malam).

Tiba kembali di Jakarta, Lanud Halim, 3 September 2025 pukul 21.00 WIB

dalam negeri. Namun demikian, lanjutnya, Kepala Negara juga memandang penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok.

"Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke Tanah Air," ungkapnya. (rls,ant,ist/lut)

ANGGOTA DPR NONAKTIF DINYATAKAN TAK DAPAT GAJI DAN TUNJANGAN

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinonaktifkan akhirnya dinyatakan tidak menerima gaji dan fasilitas apapun. Sebelumnya, para ahli menyatakan bahwa anggota DPR yang nonaktif tetap berhak mendapatkan gaji dan tunjangan karena terminologi nonaktif tidak ada dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Dalam aturan itu hanya ada terminologi diberhentikan karena alasan meninggal ataupun mengundurkan diri.

Ya pimpinan partai sudah mengirim surat kepada sekretariat DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lain," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad setelah berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa status keanggotaan di DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, termasuk terkait hak-hak keuangan. "Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menambahkan apabila belum ada aturan soal gaji dan tunjangan bagi anggota dewan yang nonaktif, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa segera menyusun aturan terkait.

"Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI)," ujarnya.

Ia menambahkan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR, sehingga tidak logis bila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.

"Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan

transparan," jelasnya dilansir antara.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Fraksi Golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan.

Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.

Demikian juga dengan Fraksi PAN DPR RI yang menegaskan komitmennya menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan, pihaknya telah mengajukan penghentian gaji, tunjangan dan lain sebagainya kepada anggota dewan yang dinonaktifkan.

"Menyikapi adanya anggota DPR RI yang berstatus nonaktif, Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan," jelasnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).



Adies Kadir, Nafa Urbach, Eko Partio, Uya Kuya, dan Sahroni.

"Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status nonaktif dihentikan selama status tersebut berlaku. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik," tuturnya.

Fraksi PAN juga menyebut langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI dan memenuhi tuntutan masyarakat. "Sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. Dengan tetap mengedepankan proses yang adil, transparan dan sesuai mekanisme resmi," kata Putri.

Sementara itu, Managing Partner Themis Indonesia Feri Am Sari sebelumnya, menjelaskan terminologi nonaktif tidak ada dalam Undang-Undang MD3. Dalam aturan itu hanya ada terminologi diberhentikan karena alasan meninggal ataupun mengundurkan diri.

"Bahasa nonaktif tidak dikenal. Artinya tidak mungkin mereka dibebaskan dari tugas-tugasnya dan dilakukan penggantian antarwaktu," katanya Senin (1/9/2025) dilansir cncbindonesia.

Sehingga, karena statusnya belum diberhentikan, maka hak dan kewajiban seperti gaji hingga fasilitas pendukung sebagai anggota dewan masih didapatkan.

"Oleh karena itu, karena mereka masih

tetap anggota dewan, maka hak dan kewajiban masih didapatkan," ujar Feri. Namun, menurut dosen hukum tata negara di Universitas Andalas ini, hal tersebut perlu dilihat sebagai upaya partai untuk meredam situasi. Meskipun tidak memberikan kepastian hukum kepada anggota DPR maupun masyarakat.

Adapun, mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebenarnya tidak ada diksi "penonaktifan" anggota dewan. Namun pemberhentian bisa dilakukan, mulai dari pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara.

Pemberhentian antarwaktu biasanya terjadi jika anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Penggantian antarwaktu bisa dilakukan sesuai dengan keputusan partai masing-masing.

Sementara itu, pemberhentian sementara bisa dilakukan karena beberapa hal. Seperti menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.

Sementara itu, Partai Nasdem mengambil keputusan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai. (rls,ant,ist/lut)



Ya pimpinan partai sudah mengirim surat kepada sekretariat DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lain,"

**SUFMI
DASCO AHMAD**

Wakil Ketua DPR

KALA MENTERI AGAMA SINGGUNG GURU DAN BERAKHIR MINTA MAAF

Lagi-lagi kegaduhan terjadi saat profesi guru disinggung pejabat negara. Terbaru, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan: "Kalau niatnya cari uang, jangan jadi guru. Tapi Insya Allah, rezeki guru itu halal dan thayyiban dan penuh keberkahan."

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf terbuka atas potongan pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir keliru dan melukai perasaan sebagian guru. Ia menegaskan, tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan profesi guru.

"Saya menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia," ujar Nasaruddin dalam unggahan di akun media sosial resmi Kementerian Agama, Kamis (4/9/2025).

Menag menuturkan, dirinya lahir dan besar dari keluarga guru. "Saya sendiri seorang guru, bapak saya juga guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru di madrasah, pondok pesantren, hingga kampus. Karena itu saya sangat memahami kemuliaan profesi ini, dan juga tahu guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak," katanya.

Sebagai bukti komitmen negara, Nasaruddin memaparkan sejumlah langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, antara lain:

Kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Kenaikan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga 700% pada 2025, dari 29.933 guru pada 2024 menjadi 206.411 guru.

Pengangkatan sekitar 52.000 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tiga tahun terakhir.

"Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Karena kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraan mereka," ucap Menag.

Viral di Medsos

Sebelumnya, pernyataan Imam Besar Masjid Istiqlal itu tentang guru viral di media sosial. Dalam potongan video yang viral, Nasaruddin mengatakan guru punya tujuan mulia untuk mencerdaskan orang, bukan sekadar mencari uang.

"Maka itu, jangan ikut-ikutan para pedagang, emang tujuannya mencari



Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar

uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya. Bukan cari uang. Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah," ujar Nasaruddin.

Dia kemudian mengatakan guru adalah pekerjaan yang paling mulia karena memintarkan orang lain. Dia mengatakan hal itu menjadi amal jariah.

"Tetapi insyaallah pekerjaan yang paling mulia itu memintarkan orang yang bodoh, itu amal jariah. Lebih kuat

amal jariahnya ketimbang pedagang membangun masjid," kata dia.

Lebih lanjut, Nasaruddin menyebut bahwa guru yang profesional harus memiliki empat kriteria, pertama adalah learning how to learn.

"Kemudian learning how to teach, bagaimana guru harus mampu mendidik muridnya belajar. Ketiga adalah teach how to learn, mengajarkan bagaimana belajar. Terakhir teaching how to teach,

mengajarkan bagaimana seharusnya mengajar yang baik," ucapnya.

Terkait guru, sebelumnya juga viral video yang dipastikan hoaks saat Sri Mulyani menyebut 'Guru Beban Negara'. Banyak pihak menikahi deepfake yang tersebar memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan kemarahan demonstrasi masyarakat yang tengah terjadi. Deepfake merupakan teknologi AI untuk menciptakan video palsu yang meyakinkan.

"Potongan video yang beredar yang menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAX," tulis Sri Mulyani, dikutip pada Senin (1/9/2025). (wid,rls,ant/dya)

Anggota DPR Usul Anggaran Pendidikan di Atas 20 Persen

ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengusulkan agar pemerintah berani mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, sesuai amanat konstitusi dan kebutuhan di lapangan.

Menurut Ledia dalam TVR 120 yang dipantau di Jakarta, Selasa, peningkatan anggaran itu memungkinkan untuk dilakukan, karena UUD RI 1945 mengatur bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

"Berani juga menambah (anggaran pendidikan). Kenyataannya masih ada yang kurang anggaran dari yang diperlukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ledia menyampaikan bahwa meskipun porsi anggaran pendidikan selalu diklaim memenuhi batas minimal 20 persen, pada praktiknya, kebutuhan sektor pendidikan belum sepenuhnya terakomodasi. Hal itu, terlihat dari masih adanya keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik, serta program-program pendukung pemerataan kualitas pendidikan.

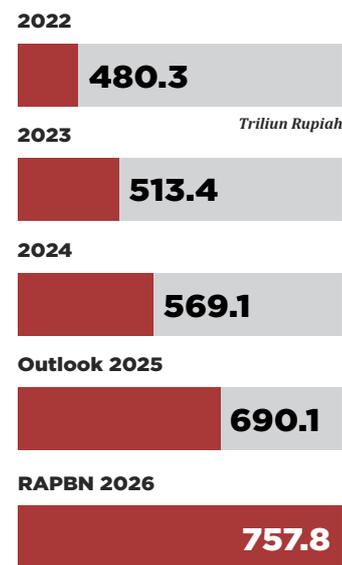
Ledia berharap alokasi anggaran dapat ditingkatkan melebihi 20 persen agar lebih berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Diketahui pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen merupakan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD RI 1945. Pasal itu menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sementara di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam Pasal 49 disebutkan bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggaran pendidikan dijaga untuk tetap mencakup 20 persen dari

PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN 2022-2026



APBN. Untuk RAPBN 2026, nilainya mencapai Rp757,8 triliun.

Rinciannya, belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp253,4 triliun. Belanja ini ditujukan untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru..(ist,wud,ant/dya)

GERAKAN NURANI BANGSA SERUKAN TOBAT NASIONAL

Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo yang menyerukan perlunya tobat nasional.

Kardinal Suharyo menegaskan, bangsa Indonesia harus berani mengakui kelemahan dan kesalahan yang ada, baik dalam aspek eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Marilah kita melakukan tobat nasional, itu kata yang menurut saya sekarang ini paling perlu. Karena kalau tidak, ya enggak tahu kita ini mau ngapain," kata Suharyo dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

"Karena kalau kita menyangkal, kita tidak akan ke mana-mana," imbuh dia.

Suharyo menegaskan, kritik dan gagasan konstruktif yang disampaikan akademisi, tokoh masyarakat, maupun kelompok sipil selama ini kerap hanya berhenti sebagai wacana. Ia mempertanyakan apakah suara publik benar-benar didengar oleh para pengambil kebijakan.

"Permintaan saya tolong pemikiran gagasan usul, khususnya dari para akademisi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun, moga-moga kami saya yakin tidak mempunyai kepentingan apa pun, selain mencintai Tanah Air," kata Kardinal.

"Tolong lah itu didengar, dipertimbangkan, dan sungguh-sungguh dipikirkan bersama-sama," ujar dia.

Suharyo menutup pesannya dengan mengingatkan kembali cita-cita kemerdekaan dan visi Indonesia Emas 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa cita-cita itu hanya bisa dicapai bila bangsa ini jujur menilai kondisi sekarang.

Diketahui, gelombang aksi demonstrasi terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.

Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubarisan aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam. Keesokan

harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.

Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif. Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusakan di beberapa lokasi.

Pesan Kebangsaan

Lima pesan kebangsaan disampaikan menyikapi situasi nasional usai gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.

Deret tokoh yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa yakni Sinta Nuriyah, Ignatius Kardinal Suharyo, Pdt. Gomar Gultom, dan Franz Magnis-



Spanduk ajakan untuk menjaga fasilitas umum dan menolak aksi anarkis terpasang di sejumlah titik di Jakarta usai keributan yang terjadi beberapa hari lalu. (antara)

Suseno SJ. Selain itu, turut menjadi pembicara Erry Riyan Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.

Sinta Nuriyah meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Ia menilai aksi rakyat turun ke jalan dipicu oleh rasa marah melihat perilaku sebagian elit eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat penegak hukum yang dinilai tidak peka pada penderitaan masyarakat.

Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan seluruh lembaga

negara untuk bertindak berdasarkan etika, kesederhanaan, dan kepatutan. Ia menilai langkah itu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah saat ini.

"Kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan bangsa. Marilah kita jadikan ini sebagai pelajaran berharga," kata Sinta Nuriyah dalam Konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025). (wid,rls,ist/dya)

POIN-POIN LIMA PESAN KEBANGSAAN

Kemanusiaan & Keberpihakan

- Kebijakan negara untuk rakyat.
- Hentikan kekerasan dalam aksi unjuk rasa.

Kepemimpinan Etis & Empatik

- Pemimpin wajib sederhana, etis, adil.
- Evaluasi kepolisian agar tidak langgar HAM.
- Ekonomi stabil & adil, APBN transparan.
- Stop fasilitas berlebih, kekayaan pejabat terbuka.
- Fokus inovasi & kesejahteraan, bukan pajak.

Supremasi Sipil & Profesionalisme Aparat

- Demokrasi harus tegak dengan supremasi sipil.
- TNI/Polri profesional sesuai tugas.

Kesadaran Publik

- Bangun solidaritas damai.
- Hindari perusakan & penjarahan.

Keterlibatan Tokoh & Masyarakat

- Libatkan tokoh agama, budaya, akademisi, rakyat.
- Doakan & jaga keselamatan bangsa.

Mahfud MD soal Demo Dibiayai Asing: Saya Enggak Percaya

MANTAN Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku tidak percaya jika demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir dibiayai oleh pihak asing.

Mahfud melihat bahwa demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, hingga influencer itu bersifat organik. "Demo kayak kemarin besarnya coba. Ada orang mengatakan itu ada yang membiayai, orang asing, dimotori, ya mungkin iya ya, kita boleh curiga, tapi saya sama sekali enggak percaya," ujar Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal Youtube Mahfud MD Official, dilihat Rabu (3/9/2025).

"Ini menurut saya adalah organik. Organik itu artinya orang betul-betul protes," sambungnya.

Sayangnya, Mahfud melihat demo yang organik itu kemudian disusupi oleh perusuh yang muncul pada

malam hari. "Ada perusuh yang datang. Dan itu, ada tumpangan, dan isu yang dibawa oleh perusuh itu adalah isu yang dibawa oleh yang organik ini," ujar Mahfud.

Adapun penyelesaian dari pemerintah, dilihat Mahfud masih sebatas langkah cepat untuk meredam aksi. Pakar hukum tata negara itu pun berharap, pemerintah serius dalam merespon tuntutan masyarakat yang diaspirasikan lewat demo. "Janji ini harus ditindak tegas, janji tidak naik (tunjangan DPR), pemerintah supaya mendengar aspirasi masyarakat ini. Nah, itu sebenarnya kan hanya langkah sementara, agar ini diam, dan ini berhasil, tapi lanjutan lanjutannya harus ada dong," ujar Mahfud.

Sementara, melalui akun media sosial X miliknya, @mohmahfudmd, Mahfud menyoroti kualitas perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya kurang aspiratif dan cenderung

monoton.

"Di DPR tak banyak perdebatan bermutu yang aspiratif. Umumnya mereka tergiring seperti bebek yang mengikuti penggembalanya yang memegang cambuk agar tak keluar jalur yang membelenggu," tulis Mahfud. (wid,sua,rls/dya)

BELANJA PEGAWAI PEMKOT MALANG BAKAL BENGKAK RP73 MILIAR

MALANG - Belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 diproyeksikan membengkak. Dari sebelumnya Rp1,022 triliun, kini diperkirakan mencapai Rp1,095 triliun atau naik sekitar Rp73 miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan peningkatan belanja pegawai terutama dipicu oleh jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik pada tahun 2025 ini.

"Kalau pengurangan nggak. Kami malah menyesuaikan. Karena kan PPPK cukup banyak juga. Dari semua yang diajukan itu ter-acc semua oleh pemerintah pusat," jelas Amithya, ujarnya, dikonfirmasi di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (3/9/2025).

Diketahui, proyeksi kenaikan belanja pegawai tersebut terjadi di tengah total belanja daerah yang juga mengalami pertambahan cukup besar. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Perubahan APBD 2025, belanja daerah naik sebesar Rp227,748 miliar. Angka ini meningkat dari semula Rp2,218 triliun

menjadi Rp2,446 triliun.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menambahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus. Karena pemerintah pusat telah menetapkan aturan, pada 2027 mendatang porsi belanja pegawai dalam APBD harus berada di bawah 30 persen.

Sementara saat ini, menurutnya porsi belanja pegawai di Pemkot Malang masih berada pada kisaran 37-39 persen. "Belanja pegawai kita sekarang di angka 37-39 persen. Karena memang itu tadi, ada kenaikan ditambah dengan PPPK itu tadi. Kan ribuan, ya. Banyak juga," tegas Mia.

Mia menyebut, DPRD bersama eksekutif tengah mengkaji pola terbaik agar porsi belanja pegawai dapat ditekan secara bertahap. Targetnya, pada 2027 mendatang komposisi belanja pegawai Kota Malang bisa sesuai aturan pemerintah pusat.

Selain belanja pegawai, Mia juga menyoroti adanya kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp150 miliar. Namun ditegaskannya, alokasi tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat. "Itu kan semua untuk masyarakat, ya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang,

Wahyu Hidayat, menuturkan pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menekan belanja pegawai. Namun, dalam PAK 2025 ini tetap terjadi kenaikan.

"Kami tetap mencoba untuk mengurangi anggaran belanja pegawai. Tetapi memang di PAK ini ada penambahan sekitar Rp73 miliar yang kami ajukan," ungkap Wahyu.

Wahyu menambahkan, perubahan anggaran dalam PAK 2025 tidak banyak berbeda dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya sudah dibahas.

"Intinya tidak banyak berubah dari rancangan penetapan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025," ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan pelaksanaan program-program daerah akan tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Selain itu,



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

Pemkot Malang juga wajib menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

"Skala program nanti akan kami sesuaikan dengan kemampuan dan juga ada Program Strategis Nasional (PSN) yang memang harus kami laksanakan, kemudian program yang ada di Pemerintahan Kota Malang," pungkasnya. (Santi/Dya)

KEJAR ADIPURA, KOTA BATU PASTIKAN 70 PERSEN SAMPAH TERTANGANI



(Ilustrasi) Pengelolaan sampah di TPA Tlekung Kota Batu. (dok. DLH Kota Batu)

justru menjadi titik balik bagi Kota Batu untuk berbenah. Dalam kurun tiga hingga empat bulan terakhir, berbagai langkah perbaikan dilakukan hingga membuat Batu menjadi salah satu kota yang dianggap paling cepat merespons instruksi Menteri LH.

"Jadi Kota Batu itu kemarin juga salah satu kota yang diberikan sanksi administratif oleh Pak Menteri LH. Tetapi kemudian setelah kami berbenah, selama 3-4 bulan terakhir ini, justru Kota Batu yang memiliki potensi untuk meraih Adipura di tahun ini," ujar Dian, dikutip pada Rabu (3/9/2025).

Upaya perbaikan itu, menurutnya terlihat dari sistem pengelolaan sampah yang kini semakin masif. Berdasarkan data, sekitar 70 persen sampah di Kota Batu sudah berhasil ditangani melalui Tempat Pengolahan

Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), Bank Sampah Unit, dan sejumlah fasilitas lainnya di hulu.

Sementara itu, sekitar 20-30 persen sampah lainnya masih dikelola di hilir. Meski demikian, dikatakannya, masih ada sekitar 10-15 ton sampah per hari, terutama dari pelaku usaha, yang belum tertangani.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dian mengaku, DLH telah menyiapkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). "Artinya, komitmen dalam waktu dekat, bisa 1-2 tahun ini, 100 persen sampah di Kota Batu terkelola," jelas Dian.

Terkait peluang meraih piala Adipura, Dian menjelaskan skema penilaian kini lebih kompleks dibanding sebelumnya. Tata kelola sampah menjadi indikator utama dengan bobot 50 persen, sedangkan 20 persen penilaian berasal dari sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan operasional, serta sisanya dari sarana prasarana pendukung.

"Kalau dulu lebih seperti beauty

contest, ya. Penilaian hanya satu dua kali pada titik tertentu yang sudah ditetapkan. Kalau sekarang ini lebih ke melihat situasi riil seperti apa. Tim penilai juga hadir secara acak ke wilayah tanpa pemberitahuan. Jadi kesiapan dimulai dari habit masyarakat," papar Dian.

Dengan skema tersebut, dirinya optimistis Kota Batu cukup siap untuk menghadapi penilaian Adipura. Skor sementara yang diterima juga menunjukkan Kota Batu sudah masuk kategori Sertifikat Adipura. Meski begitu, DLH masih terus berupaya meningkatkan capaian agar bisa meraih Piala Adipura, bahkan Adipura Kencana.

Menurutnya, hasil akhir penilaian Adipura akan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada Februari 2026 mendatang.

"Maka dari itu, Kota Batu cukup optimistis. Penilaian berlangsung sampai Desember 2025, dan kami akan terus dorong agar target tercapai," pungkasnya. (Santi/Dya)

CHINA PAMER RUDAL DI PARADE MILITER, JANGKAUAN ANTARBENUA

China menampilkan tiga jenis baru rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) berkekuatan nuklir dalam parade militer untuk memperingati 80 tahun kekalahan Kekaisaran Jepang.

Langkah ini dipandang sebagai upaya signifikan untuk memperkuat kemampuan nuklir China terhadap negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.

Selama ini, ketiadaan jaringan pangkalan militer global membuat China mengandalkan pengembangan senjata jarak jauh untuk mencegah serangan dari lawan yang berjarak ribuan kilometer.

Dari tiga rudal baru yang diperlihatkan, dua di antaranya merupakan varian lanjutan dari sistem yang sudah ada, yakni DF-5C dan DF-31BJ.

DF-5 menjadi satu-satunya rudal berbasis silo milik China sekaligus yang paling berat, dengan kemampuan membawa muatan lebih besar termasuk sejumlah kendaraan luncur kembali (reentry vehicles).

Sementara itu, DF-31 adalah rudal mobile berbasis jalan yang sejak pertengahan 2000-an menjadi tulang punggung arsenal mobile China.

Parade militer kali ini juga menampilkan kelas rudal baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu DF-61. Rudal ini diduga menggantikan DF-41 yang pertama kali dipamerkan pada parade 2019. Meski detail kemampuannya belum diketahui, DF-31BJ dan DF-61 diyakini memiliki waktu persiapan dan peluncuran lebih cepat dibanding pendahulunya.

Selain itu, ketiga rudal baru tersebut kemungkinan besar memanfaatkan kemajuan teknologi kendaraan luncur hipersonik (hypersonic glide vehicle). Teknologi ini memungkinkan rudal meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 27, menyerang dari arah tak terduga, dan menjangkau jarak yang lebih jauh, sehingga menyulitkan sistem

pertahanan udara lawan.

China sendiri sempat menarik perhatian dunia pada 2021, ketika berhasil menguji coba kendaraan luncur hipersonik antarbenua yang mengintari bumi sebelum kembali mengenai target di wilayahnya.

Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hyten, kala itu menilai uji coba tersebut sebagai perkembangan yang "sangat mengkhawatirkan" karena menunjukkan kemampuan China untuk menyerang sasaran di seluruh dunia dengan akurasi tinggi.

Dengan pameran rudal baru ini, para analis memperkirakan produksi ICBM China akan terus melampaui gabungan produksi negara lain.

China diprediksi berupaya menutup kesenjangan jumlah arsenal dengan Amerika Serikat dan Rusia, sekaligus menonjolkan keunggulan teknologi terbaru dalam sistem persenjataannya.

Tuduhan Trump

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping, Presiden

Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un sedang berkomplot melawan Amerika Serikat. Tuduhan itu disampaikan Trump melalui unggahan di media sosial saat menanggapi parade militer besar-besaran yang digelar China pada Rabu (3/9/2025).

Trump menyindir Xi Jinping dengan mempertanyakan apakah dalam parade tersebut ia akan memberikan penghormatan atas jasa Amerika Serikat yang dahulu membantu China meraih kebebasan dari penjajah asing. Ia juga menyampaikan harapan agar pengorbanan prajurit AS dihormati dan dikenang.

Di akhir unggahannya, Trump blak-blakan menunjukkan kekesalannya atas kehadiran Putin dan Kim Jong Un di parade militer itu. Dengan nada sarkastis, ia bahkan menitipkan salam kepada keduanya yang disebutnya sedang berkonspirasi melawan Amerika Serikat. (Reuters, ist/nei)



Presiden Prabowo Subianto berdiri sejajar dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di parade militer China, Rabu (3/9/2025). (Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet)

Prabowo Hadir, Ada Putin dan Kim Jong-un

PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri parade militer dalam rangka peringatan 80 tahun Victory Day sekaligus parade militer di Tiananmen Square, Beijing, China, Rabu (3/9/2025). Acara untuk memperingati kemenangan China atas pendudukan Jepang itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.

Setibanya di Tiananmen Square, para pemimpin dunia langsung disambut oleh Presiden China Xi Jinping. Terlihat Presiden Prabowo juga disambut hangat dengan berjabat tangan erat oleh Presiden Xi dan sang istri Peng Liyuan.

Selanjutnya dilakukan foto bersama oleh para pemimpin dunia. Dalam momen foto bersama, Prabowo berdiri sejajar di jajaran depan bersama Presiden China Xi

Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Xi yang bertindak sebagai tuan rumah berdiri di tengah, diapit oleh Putin dan Kim, sementara Prabowo berada di sisi kanan Putin.

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga diharapkan dapat bertemu dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir. "Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, terutama Presiden Xi. Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia

dan pemerintah Tiongkok," tutur Prasetyo Menteri Sekretaris Negara.

Adapun acara kenegaraan yang digelar China di Lapangan Tiananmen ini terlihat sangat mewah dan dipenuhi tamu undangan, masyarakat China, serta tentara China yang menggelar upacara.

Sementara itu, Asisten Menteri Luar Negeri China Hong Li mengatakan, ke-26 kepala negara dan kepala pemerintahan yang diundang antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Raja Kamboja Norodom Sihamoni, Presiden Vietnam To Lam, Presiden Laos Thongloun Sisoulith, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Daftar undangan lainnya adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli, Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, dan Presiden Tajikistan Emomali Rahmon. (AP, South China Morning Post, ist/nei)



China pamer rudal nuklir baru di parade militer, bisa sampai AS dan negara-negara Eropa. (Foto: Reuters)

Sayuran Silangan

Kurangi Risiko Kanker Usus Besar

Bagi sebagian orang, mengonsumsi sayuran masih dianggap kurang menarik. Padahal, sayuran memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan tubuh, termasuk menjaga kesehatan usus. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi rutin sayuran silangan, seperti brokoli dan kale, dapat membantu menurunkan risiko kanker usus besar.

Dilansir dari situs Ayo Sehat milik Kementerian Kesehatan, kanker usus besar merupakan kondisi ketika sel-sel di usus besar tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor ganas. Penyebab penyakit ini beragam, salah satunya terkait dengan kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti sering mengonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah serat.

Salah satu langkah pencegahan yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan tinggi serat, rendah lemak, serta memperbanyak asupan sayuran. Studi yang diterbitkan dalam *BMC Gastroenterology* (2025) menemukan bahwa kebiasaan mengonsumsi sayuran silangan dapat menurunkan risiko kanker usus besar.

Penelitian tersebut menganalisis data dari 17 studi dengan 97.000 partisipan. Hasilnya, para peneliti menemukan bahwa mengonsumsi sayuran silangan 20–40 gram per hari dapat menurunkan risiko kanker usus besar hingga 20 persen dibandingkan dengan mereka yang jarang mengonsumsinya.

Lewat studi ini, rutin mengonsumsi sekitar 20 gram sayuran silangan ditemukan dapat memberikan perlindungan terbesar bagi usus. Sementara itu, efek perlindungannya cenderung stabil pada konsumsi 40–60 gram per hari.

Selain kandungan senyawa bioaktif, sayuran silangan juga tinggi serat. Serat, baik larut maupun tidak larut, mendukung fungsi pencernaan secara keseluruhan dengan membantu usus tetap aktif dan menjaga lapisan usus tetap sehat. Kandungan serat juga memberikan asupan bagi mikrobiota usus, sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya.

“Kandungan serat larut maupun tidak larut juga memberi asupan bagi mikrobiota di usus, serta membantu menjaga lapisan usus tetap sehat dan berfungsi optimal dengan cara

menghambat pertumbuhan bakteri,” tambah Monique.

Tips Konsumsi Sayuran Silangan

Meski menyehatkan, menambahkan sayuran silangan ke menu sehari-hari bukan hal yang mudah. Sebagian orang masih kurang menyukai rasa dan aromanya. Untuk itu, Monique membagikan beberapa tips yang bisa dicoba.

Porsi yang Tepat

Mulailah dengan porsi kecil dua kali sehari, misalnya menambahkan salad kubis segar saat makan siang dan setengah porsi brokoli rebus pada makan malam, agar tubuh terbiasa mengonsumsi sayuran silangan tanpa terasa berlebihan.

Peningkatan Bertahap

Tingkatkan porsi sayuran secara perlahan seiring waktu agar tubuh lebih mudah menerima rasa dan teksturnya, misalnya dengan menambah sedikit demi sedikit jumlah sayuran dalam setiap hidangan hingga akhirnya terbiasa, sehingga asupan gizi bertambah tanpa terasa memaksa dan pola makan sehat lebih mudah dijalani secara konsisten.

Smoothie dan Jus

Campurkan sayuran seperti kangkung mentah ke dalam smoothie bersama buah-buahan agar menghasilkan rasa yang lebih segar sekaligus menambah asupan serat, vitamin, dan mineral,

sehingga minuman tidak hanya lezat tetapi juga kaya nutrisi dan mendukung pola makan sehat sehari-hari.

Telur dan Lauk Pauk

Tambahkan potongan sayuran silangan seperti brokoli atau kembang kol ke dalam telur dadar atau tumisan untuk menciptakan lauk yang lebih sehat, lezat, dan bergizi, sekaligus menambah variasi rasa serta memperkaya asupan serat, vitamin, dan mineral dalam menu harian.

Pengganti Karbohidrat

Giling kembang kol hingga bertekstur menyerupai nasi atau gantikan sebagian pasta dengan zucchini yang diiris tipis memanjang untuk menambah asupan serat sekaligus mengurangi kalori, sehingga hidangan tetap lezat namun lebih ringan dan sehat bagi tubuh.

Menumis

Tumis sayuran silangan seperti brokoli, kubis, dan kembang kol dengan sedikit bawang putih serta tambahan jamur untuk menghasilkan hidangan lezat yang kaya rasa sekaligus penuh nutrisi, cocok sebagai lauk sehat yang mudah dibuat sehari-hari.

Memanggang

Panggang sayuran seperti brokoli, kembang kol, atau asparagus pada suhu yang tepat agar teksturnya tetap renyah dan rasanya lebih gurih, sekaligus membantu meningkatkan penyerapan antioksidan serta vitamin. Cara memasak ini tidak hanya membuat hidangan lebih nikmat, tetapi juga menjaga kandungan gizi tetap optimal.

Mengukus

Mengukus sayuran dengan sedikit air merupakan cara memasak yang baik karena membantu menjaga tekstur, rasa, dan kandungan nutrisinya, sehingga Anda tetap mendapatkan manfaat serat, vitamin, serta mineral tanpa banyak kehilangan gizi penting.

Libatkan dalam Proses Memasak

Ajak anak-anak untuk ikut memilih dan memasak sayuran agar mereka merasa lebih terlibat, sehingga muncul rasa ingin tahu dan semangat untuk mencoba hasil masakan sendiri, sekaligus membantu membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.

Bumbu Penyedap

Gunakan bumbu seperti ketumbar, lada, atau perasan jeruk nipis untuk membuat rasa sayuran lebih segar dan menarik, sehingga hidangan terasa lebih lezat sekaligus mendorong kebiasaan makan sehat tanpa perlu tambahan bahan yang berlebihan. (nei,ist/dya)



STETOSKOP AI DETEKSI KELAINAN JANTUNG HANYA 15 DETIK



Para peneliti di Imperial College London, Inggris, menciptakan stetoskop yang dilengkapi teknologi AI. Apa saja fitur canggih yang dimilikinya?

Stetoskop pertama kali ditemukan pada tahun 1816 dan sejak itu menjadi salah satu alat utama dalam pemeriksaan kesehatan manusia. Saat ini, sekelompok peneliti telah mengembangkan versi terbaru dari stetoskop yang dilengkapi dengan teknologi AI.

Stetoskop berbasis AI ini mampu mendiagnosis tiga jenis gangguan jantung dalam waktu 15 detik, yakni gagal jantung, kelainan katup jantung, dan irama jantung yang tidak normal.

Stetoskop AI ini dikembangkan oleh peneliti di Imperial College London dan Imperial College Healthcare NHS. Stetoskop ini bisa

menganalisa perbedaan yang sangat kecil dalam detak jantung dan aliran darah, yang tak terdengar oleh telinga manusia. Juga bisa melakukan elektrokardiogram (ECG) secara bersamaan.

Hasil temuan ini dipresentasikan di hadapan ribuan dokter di European Society of Cardiology, pertemuan tahunan yang pada tahun 2025 ini digelar di Madrid, Spanyol, demikian dikutip dari The Guardian, Rabu (3/9/2025).

Selama masa pengembangan, tim peneliti melibatkan sekitar 12 ribu pasien di Inggris, yang semuanya memperlihatkan gejala sesak nafas dan kelelahan.

Hasil diagnosis pasien yang diperiksa menggunakan stetoskop AI ini dua kali lebih banyak terdiagnosis mengalami gagal jantung dibanding

pasien yang diperiksa menggunakan stetoskop konvensional.

Pasien-pasien itu juga tiga kali lebih banyak terdiagnosis mengalami atrial fibrillation atau detak jantung tidak normal, yang berisiko mengalami stroke. Kemudian diagnosis penyakit katup jantung juga dua kali lebih banyak dibanding menggunakan stetoskop konvensional.

Dr Patrik Bachtiger dari National Heart and Lung Institute milik Imperial College London menyebut sampai saat ini desain dari stetoskop tidak pernah berubah selama 200 tahun.

"Jadi stetoskop pintar yang sangat hebat ini hanya membutuhkan 15 detik pemeriksaan, dan AI bisa menghasilkan hasil yang cepat apakah seseorang mengalami gagal jantung, atrial fibrillation, atau penyakit katup jantung," ujarnya.

Stetoskop AI ini diproduksi oleh Eko Health, perusahaan asal California, Amerika Serikat. Ukurannya hanya sebesar kartu remi, dan pemakaiannya mirip dengan stetoskop konvensional. Yaitu

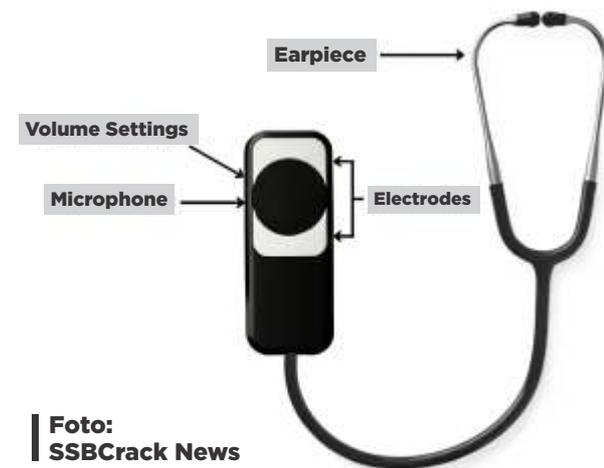
ditempelkan di dada pasien untuk merekam ECG dan menggunakan mikrofon internal untuk merekam suara aliran darah yang melewati jantung.

Hasil pengujiannya kemudian dikirim ke cloud untuk dianalisa menggunakan algoritma AI yang bisa mendeteksi masalah jantung yang tak terdengar oleh manusia.

Lalu hasilnya dikirimkan kembali ke ponsel, yaitu menentukan apakah pasien tersebut berisiko terkena tiga penyakit jantung yang bisa dideteksi tersebut.

Namun harus diakui, penggunaan stetoskop ini juga punya risiko besar untuk memberikan diagnosis yang salah pada pasien yang sehat. Untuk itulah pembuatnya menekankan penggunaan stetoskop ini hanya untuk pasien yang menunjukkan gejala kelainan jantung, bukan pada pengecekan rutin di pasien yang sehat. (nei,ist/dya)

Bagian Stetoskop AI



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Polusi Udara Berdampak Buruk pada Kesehatan Kulit

Apabila Anda tinggal di daerah perkotaan atau kawasan industri, tentu sudah tidak asing dengan polusi udara yang tersebar di berbagai tempat. Selama ini kita mengetahui bahwa polusi udara dapat merusak paru-paru, sehingga disarankan untuk menggunakan masker guna menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Namun, pernahkah Anda terpikir mengenai dampak polusi yang bertebaran di udara terhadap kesehatan kulit?

Pengaruh polusi terhadap kesehatan kulit ternyata tidak dapat dianggap sepele. Dampaknya meliputi perubahan fungsi sawar kulit, stres oksidatif, hingga terjadinya inflamasi. Polusi udara di perkotaan, seperti Jakarta, memiliki konsentrasi particulate matter (PM) yang cukup tinggi, yaitu PM2.5.

PM2.5 Itu Apa?

PM2.5 adalah konsentrasi massa partikel yang berukuran lebih kecil dari sekitar 2,5 mikron (atau mikrometer) dan dikenal juga sebagai partikel halus. Ukuran partikel ini bahkan lebih kecil dibandingkan dengan diameter sehelai rambut manusia.

Karena ukurannya yang sangat kecil, PM2.5 berpotensi masuk ke dalam pori-pori kulit dan menimbulkan berbagai permasalahan kulit yang signifikan. Berikut ini merupakan beberapa dampak buruk

polusi terhadap kesehatan kulit.

Perubahan Fungsi Sawar Kulit

Mungkin ada yang belum familiar dengan istilah sawar kulit. Sawar kulit atau skin barrier terutama berada pada lapisan terluar epidermis yang disebut stratum corneum. Fungsi skin barrier dapat diibaratkan sebagai pelindung utama bagi kulit.

Tugasnya antara lain menghalangi masuknya kuman, alergen, serta zat kimia berbahaya ke dalam kulit, mencegah kehilangan air berlebihan dari lapisan kulit, serta menjaga keseimbangan kelembapan dan kadar lipid kulit.

Stres Oksidatif

Stres oksidatif pada kulit terjadi ketika jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas antioksidan alami untuk menetralkannya. Radikal bebas sendiri merupakan molekul tidak stabil yang dapat merusak sel, protein, lipid, hingga DNA jika tidak dikendalikan.

Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh (misalnya proses metabolisme) maupun dari luar tubuh, seperti paparan polusi udara, asap rokok, radiasi sinar ultraviolet, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, hingga stres psikologis.

Ketika terjadi stres oksidatif, dampaknya bisa bervariasi mulai dari peradangan kulit, kerusakan jaringan, penurunan fungsi organ, hingga

mempercepat proses penuaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis, termasuk kanker, penyakit jantung, diabetes, gangguan saraf seperti Alzheimer dan Parkinson, serta penuaan dini pada kulit yang dikenal dengan istilah photoaging.

Inflamasi

Inflamasi merupakan respons alami yang terjadi ketika sistem imun kulit mengalami cedera, iritasi, atau serangan dari faktor eksternal, termasuk polusi udara dan paparan sinar ultraviolet berlebihan. Dampak dari kondisi ini dapat berupa kerusakan kolagen, munculnya flek, hingga meningkatnya risiko penyakit kulit kronis, seperti psoriasis.

Stres metabolik

Stres metabolik pada kulit terjadi ketika metabolisme sel kulit terganggu, yaitu saat kebutuhan energi sel tidak seimbang dengan pasokan energi dan oksigen. Penyebabnya antara lain paparan sinar ultraviolet, polusi udara, kekurangan nutrisi dan hidrasi, serta kondisi penyakit metabolik seperti diabetes.

Cara Mencegah Dampaknya

Untuk mencegah dampak polusi pada kulit, Anda bisa menggunakan masker, baju lengan panjang, dan topi saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, ada banyak cara lain yang bisa

dilakukan untuk mencegah kerusakan kulit akibat paparan polusi, antara lain

Bersihkan Kulit Secara Rutin

Mencegah dampak kerusakan akibat polusi pada kulit, seperti munculnya jerawat dan penuaan dini, bisa dilakukan dengan rutin membersihkan kotoran yang menumpuk di wajah sebelum tidur. Gunakan sabun berbahan lembut untuk kulit guna mencegah terjadinya iritasi dan alergi. Eksfoliasi untuk menghilangkan daki juga dapat dilakukan untuk memaksimalkan

Hindari Paparan Asap Rokok

Asap rokok merupakan salah satu sumber polusi pada kulit yang masih sering ditemukan di berbagai tempat, baik di luar maupun di dalam rumah. Paparan asap rokok tidak meningkatkan risiko terkena penyakit, tetapi juga kerusakan dan penuaan dini pada kulit. Oleh karena itu, jauhi paparan asap rokok dan hindari lingkungan atau tempat perokok aktif berkumpul.

Gunakan Tabir Surya

Zat polutan dari luar rumah dan paparan sinar UV bisa membuat kulit cepat rusak. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 35 atau lebih ketika beraktivitas di bawah terik matahari, terutama pada pukul 10.00–15.00. (nei,ist/dya)

Memaknai Pink, Hijau...dari hal 1

Tak butuh waktu lama, tuntutan ini menjadi perbincangan luas setelah dibagikan oleh influencer populer seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Dian Sastrowardoyo, sutradara Riri Riza Joko Anwar. Kemudian juga Andovi da Lopez, Bintang Emon, Jerome Polin, Coki Pardede, hingga Ferry Irwandi. Sampai sampai, pesohor negeri lainnya juga ikut menggaungkan tren ini. Sementara tren warna pink dan hijau tidak hanya membanjiri lini masa, namun juga merambah ke foto profil.

Di balik tren visual di media sosial, ada kisah inspiratif yang mendasari penggunaan warna pink dan hijau. Pemilihan dua warna tersebut bukanlah tanpa makna. Pink dan hijau digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Warna pink terinspirasi dari keberanian seorang ibu berkerudung pink yang menjadi sorotan saat unjuk rasa 28 Agustus 2025 di Gedung DPR/MPR. Ibu berkerudung pink ini terekam dalam banyak video sedang menyuarakan tuntutan dengan lantang, bahkan berani menghadang barisan aparat bersenjata lengkap di tengah guyuran hujan. Aksi berani ini seketika menjadi simbol kekuatan rakyat, membangkitkan semangat dan solidaritas di tengah gejolak demonstrasi.

Anang (28), sosok di balik generator website yang memungkinkan publik membuat foto profil dengan kombinasi warna itu, menuturkan bahwa simbol visual semacam ini memiliki kekuatan tersendiri dalam menggerakkan sebuah perlawanan.

Anang menilai kekuatan visual dalam sebuah pergerakan memiliki peran penting. Ia mencontohkan penggunaan simbol bendera semangka sebagai dukungan terhadap Palestina.

Menurutnya, warna pink dipilih sebagai lambang keberanian seorang ibu berhijab pink yang menjadi sorotan saat aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). "Karena kemarin ada Ibu-ibu yang cukup berani buat menghadapi polisi dan dia kan pake jilbab pink ya dan ya cukup berani vokal," ujar Anang dikutip Kompas.com (3/9/2025).

Momen keberanian itu terekam dalam foto-foto yang beredar luas di media sosial. Gambar tersebut memperlihatkan sosok ibu-ibu berdiri di atas aspal yang basah, kuyup diguyur hujan, sambil mengibarkan bendera Merah Putih menghadapi barisan aparat dengan perlengkapan lengkap.

Tindakan ibu itu menuai banyak dukungan dari pengunjung rasa maupun warganet yang menyebutnya

sebagai momen heroik sekaligus simbol perlawanan rakyat.

Sedangkan warna hijau dimaknai sebagai simbol solidaritas untuk almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas aparat saat aksi unjuk rasa. Selain itu, hijau juga erat kaitannya dengan identitas pengemudi ojol yang identik dengan jaket dan helm berwarna hijau.

"Buat hijaunya juga kan diambil dari Almarhum Affan sama temen-temen Ojek Online. Yang udah banyak lah berjuang beberapa hari kemarin," ungkap dia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya bukan pihak pertama yang memulai tren ini. Ia hanya membuat generator foto profil agar masyarakat awam lebih mudah mengikuti tren tersebut. "Tapi ini yang initiate bukan saya karena saya juga tadi liat dari beberapa akun yang udah pakai duluan. Jadi saya hanya mempermudah orang-orang awam biar bisa lebih gampang pakai ini," kata dia.

Anang menyebut istilah Brave Pink dan Hero Green baru populer dalam satu-dua hari terakhir. Lebih jauh, ia berharap tren penggunaan warna pink dan hijau ini tidak berhenti pada simbol visual semata, melainkan dapat mendorong masyarakat mencari tahu lebih dalam terkait isu yang diperjuangkan massa aksi.

"Semoga ke depannya mungkin kayak salah satunya dengan orang kayak FOMO gitu, dengan pakai foto profil si pink dan hijau ini. Jadi nyari tau juga apa sih inti dari masalah yang lagi diperjuangkan sama orang-orang itu apa gitu," pungkask dia.

Sementara itu, secara universal, sebuah jurnal yang bersumber dari Telkom University menyebutkan warna pink melambangkan empati, pengertian, dan kebaikan, yang kian memperkuat maknanya sebagai simbol perlawanan rakyat. Di balik keberanian yang disimbolkan, warna pink juga merepresentasikan kelembutan, empati, dan kasih sayang—sebuah pendekatan yang lebih halus dalam perjuangan.

Warna hijau yang viral belakangan ini memiliki makna yang berbeda namun sama kuatnya. Warna ini menjadi simbol solidaritas untuk mendiagnosa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban kekerasan aparat saat demonstrasi. Sebagai warna identitas pengemudi ojol, hijau melambangkan perjuangan rakyat kecil. Di sisi lain,

Andhyta Firselly Utami, salah satu inisiator kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat mengatakan, ia dan sejumlah masyarakat sipil lainnya membentuk rangkuman tuntutan itu dengan tujuan agar ada suatu muara narasi yang mampu mewakili berbagai aspirasi rakyat.

Perempuan yang akrab disapa Afu

itu menyebut, selama rangkaian aksi demonstrasi yang dimulai sejak Senin (25/8/2025) lalu, belum ada suatu narasi tuntutan yang diusung secara bersama-sama oleh rakyat. Kondisi ini berbeda dengan aksi-aksi demonstrasi sebelumnya, seperti aksi Indonesia Gelap dan aksi Indonesia Darurat Demokrasi yang sudah memiliki suatu konsensus terkait tuntutan yang jelas.

"Setelah kemudian terjadi pembunuhan Affan, terus kekerasan sebagainya, banyak demo terjadi, tapi nggak ada satu narasi bersama gitu yang benar-benar mainstream," kata Afu dilansir Tirto pada Selasa (2/9/2025).

Dalam menyusun 17+8 Tuntutan Rakyat, Afu dan para inisiator lainnya terlebih dahulu melakukan ulasan terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga petisi "12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan" yang telah ditandatangani oleh lebih dari 40 ribu orang.

Afu menjelaskan, rangkuman tuntutan itu dibuat guna memudahkan para pihak berwenang untuk mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan rakyat selama ini. Oleh karenanya, hingga saat ini organisasi masyarakat sipil disebutkan telah mengirimkan rangkuman tuntutan itu kepada para pihak yang dituntut.

Sementara itu, Direktur The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menyebut rangkuman 17+8 Tuntutan Rakyat itu akan mempermudah pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam mendengarkan aspirasi rakyat selama ini. Setelah dipublikasikannya kampanye ini, Adinda berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti apa-apa saja yang dituntut oleh rakyatnya.

Menurut Adinda, selain menindaklanjuti tuntutan-tuntutan jangka pendek, ia juga berharap pemerintah bisa segera mengeksekusi berbagai tuntutan jangka panjang yang selama ini telah disuarakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil.

"[Menindaklanjuti] bukan hanya yang terjadi sejak Agustus dengan banyak korban hingga hari ini, tapi juga tuntutan yang sudah terjadi sejak lama gitu," tutur Adinda dihubungi terpisah oleh Tirto, Selasa (2/9/2025).

Meski begitu, Adinda mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Ada tuntutan yang sifatnya memang butuh proses lebih panjang, terutama yang menyangkut reformasi kelembagaan dan legislasi.

Adinda juga menilai sikap pemerintah sejauh ini cenderung kontradiktif dari tuntutan masyarakat. Di satu sisi, Presiden menyatakan

terbuka terhadap aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, masih ada penangkapan aktivis, mahasiswa, hingga korban jiwa dalam rangkaian aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa 17 tuntutan jangka pendek itu masih jauh dari terpenuhi. "Hingga saat ini dengan kejadian yang tewas, ada penangkapan termasuk aktivis dan mahasiswa, menurut saya jelas 17 tuntutan ini belum terpenuhi hingga saat ini dan malah masih menimbulkan gejolak gitu. Nah, misalnya kalau 17 tuntutan jangka pendek dalam waktu satu minggu, saya pikir saya kurang yakin ya," ucapnya.

Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal salah satu poin tuntutan, di mana Badan Kehormatan DPR diharapkan bisa menindak anggota yang bermasalah. Menurutnya, hal ini sulit berjalan karena anggota badan tersebut juga berasal dari DPR sendiri. Hal itu menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal parlemen.

"Karena menurut saya misalnya nih, dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah. Ya anggota Badan Kehormatan bukannya orang DPR juga kan ya?" kata Adinda.

Meski demikian, ia menilai 17+8 Tuntutan Rakyat tetap menjadi kampanye yang strategis. Publik kini memiliki peta tuntutan yang jelas dan bisa terus mengingatkan pemerintah maupun parlemen.

Adinda mengakui, keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri. Ia menilai sulit bagi pemerintah untuk merespons semua tuntutan sebelum tenggat waktu 5 September. Namun, ia masih melihat peluang realisasi pada tuntutan jangka panjang yang diberi batas waktu hingga 31 Agustus 2026.

Baginya, reformasi partai politik adalah salah satu isu yang paling penting untuk didorong. Ia menekankan bahwa prapoli merupakan hulu dari persoalan politik di Indonesia, termasuk maraknya praktik korupsi. Karena itu, reformasi di tubuh partai politik menjadi pondasi penting bagi perbaikan demokrasi.

"Kalau bicara dari hulu ke hilir ya, mereka [yang ada di parpol] sumbernya kan? Sumber pemimpin politik, sumber pelaku korupsi juga," tegasnya.

Adinda juga menyinggung urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menganggap aneh jika DPR terus menunda pengesahan aturan yang sebenarnya sangat penting untuk pemberantasan korupsi itu. Dalam konteks legislasi, ia menilai prolegnas harus dijadikan acuan yang jelas agar publik bisa menilai komitmen parlemen. (dya,ant,ist/lut)



DPRD JATIM: PERUBAHAN APBD 2025 WUJUDKAN SENSE OF CRISIS DAN KEMASLAHATAN RAKYAT

SURABAYA- DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 memiliki tujuan strategis. Melalui kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan sekaligus menjawab berbagai problematika masyarakat saat ini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menjelaskan, momentum perubahan APBD 2025 tidak hanya sebatas penyesuaian teknis angka-angka anggaran. Tetapi juga merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan sense of crisis di tengah situasi ekonomi daerah maupun nasional yang menuntut kebijakan lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pembahasan atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur serta menyelesaikan berbagai problem masyarakat melalui kebijakan anggaran,” ungkap Deni Wicaksono, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Badan Anggaran atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/9/2025).

Sementara, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyampaikan terjadi perubahan signifikan pada struktur anggaran daerah. Belanja Daerah yang semula dianggarkan dalam APBD murni 2025 sebesar Rp30,223 triliun naik menjadi Rp32,996 triliun pada Perubahan APBD 2025. Artinya, ada penambahan alokasi belanja daerah sebesar Rp2,772 triliun.

Namun, digarisbawahi bila kenaikan belanja daerah ini berdampak langsung terhadap posisi defisit. Semula defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp1,775 triliun, kini membengkak menjadi Rp4,397 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan defisit sebesar Rp2,621 triliun.

Kondisi ini, menurut Banggar, harus disikapi dengan bijak. “Dengan perubahan alokasi belanja daerah yang lebih besar daripada target pendapatan daerah, tentu terjadi perubahan defisit. Namun demikian, Banggar menilai bahwa penambahan belanja ini harus benar-benar diarahkan untuk program



yang menyentuh kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Banggar DPRD Jatim memberikan apresiasi tinggi atas ikhtiar yang ditunjukkan pimpinan dan anggota Komisi selama proses pembahasan. Menurut Abdullah Abu Bakar, seluruh Komisi telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal agar momentum perubahan APBD menjadi instrumen nyata bagi kemaslahatan warga Jawa Timur.

“Badan Anggaran sangat mengapresiasi hasil pembahasan di tingkat Komisi yang bermuara pada pendayagunaan anggaran daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Ini menunjukkan bahwa seluruh pihak menyadari pentingnya sense of crisis dalam penyusunan anggaran,” jelasnya.

Banggar kemudian memaparkan hasil pembahasan di masing-masing Komisi DPRD Jatim, mulai dari Komisi A hingga Komisi E.

Komisi A DPRD Jatim, yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan aparatur, menekankan perlunya penambahan anggaran belanja sebesar Rp7,1 miliar. Penambahan ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta dukungan terhadap program strategis baik daerah maupun nasional.

Abdullah Abu Bakar menjelaskan Komisi A juga menaruh perhatian pada penyesuaian struktur belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rekomendasi yang diberikan menitikberatkan pada keseimbangan antara belanja rutin, kebutuhan prioritas, dan upaya transformasi

digital dalam birokrasi.

“Komisi A mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan, penguatan SDM aparatur, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Sinergi dengan masyarakat juga harus diperkuat agar pelayanan publik semakin responsif,” katanya.

Komisi B DPRD Jatim memfokuskan pembahasannya pada sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sektor tersebut mencakup pertanian, peternakan, ke-lautan, perkebunan, UMKM, per-dagangan, pariwisata, dan kehutanan.

Banggar mendukung penuh pandangan Komisi B ini. Menurut Abdullah Abu Bakar, penguatan sektor-sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian daerah.

“Komisi B menilai penting adanya dukungan lebih besar terhadap sektor strategis yang selama ini terbukti resilien menghadapi tekanan ekonomi. Banggar sepakat bahwa sektor-sektor ini perlu menjadi prioritas dalam Perubahan APBD 2025,” paparnya.

Dalam laporan Komisi C, DPRD Jatim memberikan dukungan terhadap inisiatif pinjaman daerah yang digunakan untuk menambah modal BPR Jatim sebesar Rp300 miliar. Modal tambahan ini diarahkan bagi program Prokesra, yakni program pembangunan ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, Abdullah Abu Bakar mengingatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi

syarat mutlak.

“Komisi C masih sangat berharap agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, khususnya untuk optimalisasi aset, melalui sinergi bisnis BUMD,” ujarnya.

Banggar sepakat dengan pandangan ini, mengingat peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.

Sementara untuk Komisi D DPRD Jatim, yang membidangi urusan pembangunan, mengusulkan penambahan anggaran belanja sebesar Rp20 miliar bagi OPD mitranya. Fokus tambahan anggaran ini adalah pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta pelayanan dasar masyarakat.

Banggar menilai usulan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, mengingat infrastruktur pelayanan dasar merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.

“Banggar sependapat bahwa penambahan belanja ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan,” tegasnya.

Komisi E DPRD Jatim menekankan perlunya penguatan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, literasi, dan olahraga. Usulan tambahan anggaran bagi OPD mitra Komisi E mencapai Rp161,7 miliar.

Tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan gaji dan tunjangan guru, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, pengadaan sarana prasarana sekolah, serta layanan kesehatan melalui skema KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Selain itu, juga dialokasikan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis.

Tidak hanya itu, Komisi E juga mendorong dukungan terhadap pengembangan seni budaya, literasi digital, olahraga masyarakat, dan kesiapsiagaan bencana.

“Banggar sependapat dengan Komisi E bahwa Pemerintah Provinsi harus memastikan penganggaran daerah sesuai RKPD, transparan, serta tepat sasaran. Program-program yang diajukan harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (adv,pra/dya)